



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK : skisamrat@yahoo.co.id

09 April 2025

Kepada Yth,
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Di-
Tempat.

SURAT PENGANTAR
NOMOR: B.139/BKIPM.MDO/TU.210/IV/2025

NO	Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Balai KIPM Manado Triwulan I tahun 2025	1(satu) Eksemplar	Di sampaikan dengan hormat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Kepala,

MUHLIN, S.Pi, M.Si

Diterima Tanggal :

Nama Penerima :

Tandatangan :



LAPORAN KINERJA

BPPMHKP MANADO

Triwulan I

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan I tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado triwulan I tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan I tahun 2025 adalah mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Selama triwulan I tahun 2025 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.



**Laporan Kinerja
BKIPM Manado
Triwulan I Tahun 2025**

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Manado, 04 April 2024


Muhlin, S.Pi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada Triwulan I tahun 2025, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Triwulan I Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Triwulan II Tahun 2025 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
 BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	I
Tujuan	3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Manado ..	4
Sistematika dan Penyajian	8
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Rencana Strategis 2020-2024	9
Rencana Kinerja 2022	19
Anggaran Balai KIPM Manado	21
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	24
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
 BAB IV Penutup	41
Lampiran	42



**Laporan Kinerja
BKIPM Manado
Triwulan I Tahun 2025**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2025	20
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	22
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN I 2025	25
Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan I 2025 Per Jenis Kegiatan	36

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2021-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Manado dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan tangan dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado (BPPMHKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Manado yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado, maka disusun Pelaporan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

TUJUAN

Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Manado yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

I. Kepala

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merupakan unit pelaksana teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Manado adalah jabatan struktural Eselon III a yang membawahi 1 (satu) jabatan Struktural Eselon IV a dan 2 (dua) jabatan fungsional sub koordinator dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional,

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Struktural bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan umum dan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian

laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Triwulan I Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2023.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Manado.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2023.
4. **BAB III. Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.
5. **BAB I. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 2023, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, Rencana Strategis 2021-2024, serta Penetapan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2021 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2021-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Manado menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2021-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2021-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dari program yang dilaksanakan yaitu:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

Arah Kebijakan BPPMHKP Manado

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju

dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, salah satu agenda pembangunan yang diusung oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan;
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasle;
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan karantina;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasle;
6. kegiatan inspeksi dan surveillance sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium pengujian;
10. meningkatkan kompetensi laboran dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium;

11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan;

Disamping dua agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik;

5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM Manado. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi

dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM Manado dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2021-2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional. Selain itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan peningkatan kualitas layanan sertifikasi melalui layanan berbasis digital dan penyediaan full service 1 x 24 jam setiap hari kepada pengguna jasa. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan instansi terkait ataupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Utara ke beberapa Negara tujuan ekspor, seperti yang telah dilakukan awal tahun 2023 yang mana Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Manado dan BEA Cukai Manado telah berhasil mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari bandara samratulangi manado ke Jepang. Direct call ekspor merupakan salah satu instrumen sebagai upaya meningkatkan daya saing, volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara karena dengan direct call ini maka efesiensi waktu dan biaya dapat dilakukan.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah modernisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Kantor pelayanan Bea Cukai Manado dan Bitung. Selain itu untuk memperlancar arus barang juga dilakukan upaya bersama instansi terkait dalam mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Manado ke Negara-negara tujuan ekspor yang potensial.

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboran dan menambah ruang lingkup pengujian laboratorium.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

RENCANA KINERJA 2025

Rencana kinerja Tahun 2025, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2025 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Manado diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan peta strategi (*strategy map*) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2025. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tersebut diturunkan (*cascading process*) ke sub koordinator sampai dengan tingkat indlidu.

Target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Manado Tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

S	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	92	
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	71.5	
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	87	

		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	86	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	76	
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	1	
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88	

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2025 sebesar) Rp.10.077.579.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan

prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	355.000.000,-
2	Manajemen Mutu	167.000.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.555.579.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2025		10.077.579.000

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka Maksimum adalah 120;
2. Angka Minimum adalah 0;

3. Formula Penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda sebagaimana penjelasa berikut :

- a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah reaalisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Triwulan I Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	% Capaian
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	100	142,85%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	98.83	141.18%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	100	101 %
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	81.35	108.46%
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	84.85	111,13
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	-	-	-
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88	92.40	105,00

		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	-	-	-
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	100	117,6
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	76	99.06	130.34
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	-	-	-

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

I. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan mejadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 98.83% sehingga capaiannya menjadi 141,18%

IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini iku ini pada Balai KIPM Manado ditargetkan 99% dan telah tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 101%.

II. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP

IKU 4. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

I. Ruang Lingkup;

2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini iku ini ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 83.35 hingga capaiannya menjadi 108.46%

IKU 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini ditargetkan indeks 75 dan terealisasi menjadi 84.85 sehingga capaiannya menjadi 113.13

III. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung

indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak ada target yang ditentukan pada IKU ini.

IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori

Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;

5. Sangat Kurang, apabila $NKA \leq 50$

Nilai Indikator ini pada triwulan I tahun 2025 mempunyai target 88 dan telah terealisasi sebesar 92.40 sehingga capaiannya menjadi 105.00

IKU 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada target yang ditentukan.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada triwulan I 2025 indikator ini tidak ada target yang ditentukan

IKU 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Pada Triwulan I Tahun 2025 Tidak ada Target yang ditentukan

IKU 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Pada triwulan I tahun 2025 indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan belum ada target.

IKU 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan 85 dan telah terealisasi 100 sehingga capaiannya menjadi 117.6.

IKU 14. Inovasi Pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan

Kelompok inovasi: umum, khusus

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.

- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pada Triwulan I Indikator ini belum ada target.

IKU 15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP (Indeks)

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan I tahun 2025 belum ada target pada IKU ini.

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado Tahun 2025 sebesar Rp. 10.077.579.000,- dan pada triwulan I Tahun 2025 sudah terealisasi Sebesar Rp 1.650.646.117,- atau mencapai 16.38%. disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi DIPA (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	5.357.221.000	1.088.654.037	20.32
Belanja barang (52)	4.720.358.000	561.992.080	11.91
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	10.077.579.000.000	1.650.646.117	16.38

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I 2025, dari 15 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua indikator capaiannya sesuai dan Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan I 2025 sesuai dengan target. Yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Manado di Triwulan I Tahun 2025 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Triwulan I 2025 dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, BPPMHKP Manado tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens antara Pusat dan UPT untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran masing-masing indikator kinerja untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah serta instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlu adanya program/kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja BPPMHKP Triwulan I 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.